

Pengaruh Kompetensi, Independen, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara)

Fauziah

Politeknik Ganesha Medan
Jl. Veteran No. 190 Pasar VI Manunggal
Email : yenniramadhani@rocketmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh kompetensi, independensi dan motivasi untuk kualitas audit di bidang pengawasan keuangan di auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif adalah untuk mengetahui pengaruh variabel dependen dan variabel independen digambarkan numerik dan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner (angket), yang telah terstruktur dengan tujuan mengumpulkan informasi dari BPKP Perwakilan auditor Provinsi Sumatera Utara sebagai responden dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari hasil laporan pemantauan pada kualitas akuntabilitas keuangan Negara / Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebesar 126 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh / sensus berdasarkan ketersediaan data yang sesuai variabel penelitian berjumlah 126 orang. Dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan nilai R dari 0,741 (74,1%). Penelitian ini menghasilkan penemuan empat sebagai hipotesis penelitian. Pertama, kompetensi dan efek positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Kedua, independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Ketiga, motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Keempat, dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi, independensi dan motivasi bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dan efek positif terhadap kualitas audit.

Kata Kunci—*Kompetensi, Independensi, Motivasi, Kualitas Audit*

I. PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik oleh auditor atas pelaksanaan pemerintahan. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik juga harus didukung oleh kualitas audit yang baik. Karena jika kualitas audit rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran.

“Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menegaskan peran BPKP sebagai auditor Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP. Peran strategis tersebut telah disikapi dengan melakukan reposisi dan revitalisasi (repovi). (Lakip BPKP, 2014 : 9).”

Sebagai bagian dari agenda repovi tersebut, BPKP telah melakukan perubahan visi, sebelumnya berisikan “*katalisator pembaharuan manajemen pemerintah*” ke arah penguatan jati diri sebagai “*auditor Presiden*” sesuai dengan kompetensi kunci. Hal tersebut lebih mengedepankan peran proaktif BPKP untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholders* dan *shareholder* melalui strategi pengawasan *pre-emptive, preventif dan represif*. BPKP telah merubah paradigmanya sebagai pengawas internal dengan menjalankan dua jenis jasa, yaitu memberikan jasa *assurance dan consulting*. Dengan paradigma baru tersebut, BPKP menjadi suatu lembaga pengawasan yang kemampuannya tidak hanya sekedar menunjukkan kesalahan lewat serangkaian audit, melainkan juga mampu memberikan saran dan masukan di bidang perbaikan manajemen pemerintahan.

Sedangkan berdasarkan tujuan pembentukannya, BPKP berperan untuk menciptakan pemerintahan yang

good governance yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu hasil audit dari BPKP adalah sebuah kesimpulan mengenai ada tidaknya indikasi tindak pidana ataupun perdata yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu audit yang dilakukan oleh BPKP harus berkualitas.

Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya (Kusharyanti, 2003 dalam Annisa, 2012). Kualitas audit yang baik maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi (SFAC, 2000 dalam Annisa, 2012). Sedangkan pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil (Sutton, 1993). Dalam sektor publik, *Government Accountability Office* (GAO), mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon *et al.*, 2005).

Di Sumatera Utara fenomena hasil audit BPKP Sumatera Utara terkesan lamban dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi Bupati Tobasa senilai 3,5 Miliar yang terbengkalai. BPKP dinilai lambat menghitung kerugian negara atas kasus korupsi tersebut (www.metrosiantar.com diakses 15 mei 2015). Begitu juga kasus dugaan korupsi Pemko Binjai, BPKP Sumatera Utara lamban merespon hasil audit penggunaan anggaran di satuan SKPD Pemko Binjai (www.delinewsonline.com diakses 13 mei 2015). Mengapa lembaga pengawasan ini belum melaksanakan fungsi dengan baik sehingga penyimpangan itu bisa terjadi, padahal disisi lain pengawasan, pemeriksaan, pembina pengelolaan keuangan daerah adalah tugas pokok dari BPKP.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan standar umum pertama SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”.

Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas

tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Selain keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 1998). Pernyataan standar umum kedua SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Dengan demikian kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik. Namun, belum tentu auditor yang memiliki kedua hal di atas akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Annisa Perday dan Sri Suranta (2012) yang berjudul pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit investigatif pada kantor perwakilan BPK-RI Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit investigatif, sedangkan independensi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit investigatif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kompetensi, independensi, motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit dan menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan karena selain mematangkan pertimbangan dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan, juga penting untuk mencapai harapan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan demikian, peneliti ingin

menguji pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Cahyat, 2004).

Menurut Susmanto (2008), APIP melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan negara agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang dipimpinnya (fungsi *quality assurance*). Pengawasan yang dilaksanakan APIP diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab para pimpinan penyelenggara pemerintahan tersebut. Lembaga/badan/unit yang ada di dalam tubuh pemerintah (pengawas intern pemerintah), yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri dari: pertama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); kedua, Inspektorat Jenderal Departemen; ketiga, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) /Kementerian; dan keempat, Lembaga Pengawasan Daerah atau Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.

III. PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh kompetensi, independensi dan motivasi terhadap kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah sehingga menggunakan pendekatan asosiatif yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen yang digambarkan secara numerik dan data. Kompetensi, independensi dan motivasi auditor adalah variabel independen. Sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 126 orang. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai responden dalam penelitian ini.

1. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat De Angelo bahwa kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi).

2. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Independensi merupakan suatu tindakan baik sikap perbuatan atau mental auditor dalam sepanjang pelaksanaan audit dimana auditor dapat memposisikan dirinya dengan *auditee* nya secara tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak – pihak yang berkepentingan terhadap hasil auditnya.

3. Pengaruh Motivasi Terhadap Kualitas Audit

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lilis Ardini (2010) menyatakan variabel motivasi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit di tolak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan :

1. Kompetensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit, sehingga semakin baik tingkat kompetensi, maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.
2. Independensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit, sehingga semakin baik independensi yang dimiliki, maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.
3. Motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, sehingga tinggi atau rendah tingkat motivasi, belum tentu juga semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

4. Kompetensi, independensi, dan motivasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh auditor BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

REFERENSI

- [1] Alim, M.N., T. Hapsari, dan L. Purwanti, (2007). Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- [2] Alvin A., dan James K. Loebbecke. (2000). *Auditing*. Buku Satu, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- [3] Analisa Daily (2015), Audit BPKP Dinilai Cenderung Kriminalisasi Tersangka Korupsi, <http://old.m.m.m.analisedaily.com>.
- [4] Annisa Perdany dan Sri Suranta, (2012). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif pada Kantor Perwakilan BPK RI Yogyakarta, Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
- [5] Arfan Ikhsan (2008). Metodologi Penelitian Akuntansi Keprilakuaan, Edisi I, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [6] Bintang Susmanto, (2008). Pengawasan Intern pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. <http://www.Menkokesra.go.id/content/view/117/323>.
- [7] BPKP, (1998). *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Kedua. Cetakan Pertama Yogyakarta : BPFE
- [8] _____ (2014). Laporan Hasil Pengawasan Atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, Nomor : Lap-22/PW 02/4/2015, tanggal 27 Januari 2015. BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- [9] Cahyat, A. (2004). Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan, *Governance Brief Number 3*.
- [10] Christiawan, Yulius Jogi, (2000). Konsep Pengauditan dalam Lingkungan Pengolahan Data Akuntansi Terkomputerisasi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*.
- [11] Darsono dan Harmailis. (2011). Identifikasi Faktor-Faktor Yang Memotivasi Auditor Untuk Menjadi Auditor Investigatif pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Tesis, Universitas Widyatama, Bandung.
- [12] Deli News, (2015). BPKP Sumut Lamban Merespon Audit Penggunaan Anggaran Pemko Binjai, <http://www.delinewsonline.com>.
- [13] Dyah Setyaningrum, (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK-RI. *Jurnal Universitas Indonesia*.
- [14] Eko Suyono, (2011). *The Effect of Independence, Experience, and Accountability to The Audit Quality*, *Journal Economy and Bussiness*.
- [15] Evi Octavia, (2015). *The Effect of Comptence and Independence of Auditors on the Auditquality*. *Journal of Finance and Accounting*. Vol. 6, No. 3.
- [16] Guy, M., and Wayne, C (2002). *Auditing*. Edisi Kelima. Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- [17] Imam Ghozali, (2006). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Edisi 3, BP Undip, Semarang.
- [18] Herawaty dan Susiana Arleen, (2007). Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme *Corporate Governance*, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan, *Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. X. 01-31.
- [19] Hiro Tugiman, (2006). *Standar Profesional Audit Internal*. Cetakan Kesembilan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- [20] Kompas (2015). KPK ingin Kasus E-KTP Percepat Audit Kerugian Negara dalam Kasus E-KTP www.Nasionalkompas.com. Diakses tanggal 25 Mei 2015.
- [21] Lowenshon, S., Johnson E.L., dan Elder J.R (2005). Auditor Specialization and Perceived Audit Quality, Auditee Satisfaction, and Audit Fees in the Local Government Audit Market.
- [22] Mardiasmo, (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [23] _____ (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1.
- [24] Mayangsari, S. (2003). Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit : Suatu Kuasieksperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 6. No. 1. Januari.
- [25] Messier, F.W., V.S. Glover, dan F.D. Prawitt. (2005). *Jasa Audit dan Assurance: Suatu Pendekatan Sistematis*. Diterjemahkan oleh Nuri Hinduan. Edisi 4 Buku 1 & 2, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- [26] Metro Siantar news, (2015). Masih banyak ditemukan hasil audit BPKP Sumut terkesan lambat www.metroSiantar.com. Diakses tanggal 15 Mei 2015.
- [27] Moekjizat, (2002). *Dasar-Dasar Motivasi*, Pioner Jaya, Jakarta.
- [28] Mulyadi, (2002). *Pemeriksaan Akuntan*. Yogyakarta: Badan Penerbit STIE YKPN.
- [29] Muh. Taufik, Efendy, (2010). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Pemerintah Gorontalo, Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- [30] Nelli Novyarni, (2014). *Influence of Internal Auditor Competence and Independence on the Quality of Financial Reporting by Municipal/Provincial Government*, *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol II, Issue 10, October.
- [31] Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta.
- [32] Robbins, S.P., T.A. Judge. (2008). *Perilaku Organisasi*. Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat.

- [33]S, Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan Ke dua belas, edisi revisi V, Jakarta : Rineka Cipta
- [34]Sri Lastanti dan Hexana, (2005). Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informas*, Vol. 5 No. 1 April 2005.
- [35]Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- [36]Sukrisno Agoes (2004). *Auditing II*. Edisi Ketiga. Penerbit : LP FEUI
- [37]Suryabrata., Sumadi (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- [38]Suwandi, (2005). Pengaruh Kejelasan Peran dan Motivasi Kerja terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. *Tesis tidak dipublikasikan*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- [39]Tampubolon, R, (2005). *Risk and System-Based Internal Audit*. Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta.
- [40]Wahjosumidjo, (1987). *Kepemimpinan dan Motivasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.